

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Penelitian

Berakhirnya Perang Dunia ke-II, berbagai organisasi internasional muncul untuk menjaga keamanan dan perdamaian di seluruh dunia dan mencegah perang terjadi kembali. Evans dan Newnham menyatakan bahwa organisasi internasional adalah organisasi resmi yang dibentuk melalui kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat dalam hubungan internasional. Perjanjian tersebut umumnya bersifat multilateral karena melibatkan lebih dari dua negara. Untuk mencapai perdamaian global dalam hubungan antarbangsa, *common interest* menjadi salah satu alasan utama dibentuknya organisasi internasional. (Hennida, 2015).

Organisasi internasional adalah perjanjian yang dinegosiasikan antara pihak-pihak internasional, dan mereka memiliki perilaku otorisasi yang dapat menyarankan atau menerapkan larangan dan batasan tertentu terkait masalah tertentu. Organisasi internasional memiliki hal-hal seperti kerja sama yang efektif, struktur organisasi yang jelas, dan pelaksanaan tugas yang konsisten. Alvarez mendefinisikan organisasi internasional dengan menyebutkan syarat-syarat sebuah organisasi internasional, yaitu sebagai entitas antar pemerintah yang didirikan melalui sebuah perjanjian, memiliki sekretariat permanen, mengadakan sidang pleno yang terdiri dari seluruh negara anggota, dan organ eksekutif yang memiliki partisipasi yang lebih terbatas (Hennida, 2015).

Ada dua jenis organisasi internasional, yaitu *International Governmental Organization/IGO* (Organisasi Pemerintah Internasional) dan *Non Governmental Organization/NGO* (Organisasi Non Pemerintah). NGO mulai muncul setelah berdirinya PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) pada tahun 1945. Piagam PBB Pasal 71 Bab 10 mengatur peran konsultatif organisasi non-pemerintah dalam mengatur keberadaan NGO (Ferdinanduscredo99, 2019, p. 1).

NGO terorganisir secara lokal, nasional, atau internasional dan beroperasi sebagai kelompok sukarela yang tidak mencari keuntungan. Organisasi non-pemerintah dianggap sebagai pelaku utama sektor ketiga dalam tindakan publik di bidang seperti pembangunan, hak asasi manusia, kemanusiaan, dan lingkungan. (Lewis). Definisi NGO tidak terbatas pada organisasi yang melayani kebutuhan sosial masyarakat, tetapi juga bagi beberapa perusahaan. NGO memiliki karakteristik yang ditandai dengan non-partisipan, sukarela, tidak mencari keuntungan ekonomi, dan bersandar pada gerakan moral. Keberadaan NGO sangat penting dalam kehidupan masyarakat, terutama bagi masyarakat kurang mampu. Mereka bersama-sama memperjuangkan kesejahteraan masyarakat tanpa mengambil keuntungan dari hal tersebut. Survei menunjukkan bahwa NGO memiliki tingkat kepercayaan publik yang tinggi, sehingga mereka dapat menjadi perwakilan yang berguna bagi kepentingan masyarakat dan pemangku kepentingan. NGO fokus pada berbagai isu dan bidang, seperti hak-hak perempuan, lingkungan dan planet, perawatan kesehatan, advokasi politik, serikat pekerja, keyakinan agama, perawatan lanjut usia, dan pemberdayaan pemuda (J.Feld et al., 1994).

Operasional NGO mencakup hingga internasional atau nasional. Salah satunya adalah WFWI (*Women For Women International*). WFWI adalah organisasi

kemanusiaan nirlaba independen yang menyediakan alat dan sumber daya bagi para perempuan yang selamat dari perang, perselisihan sipil, dan konflik lainnya untuk beralih dari krisis dan kemiskinan menuju stabilitas dan swasembada yang demikian mempromosikan masyarakat sipil yang layak. Organisasi ini didirikan pada tahun 1993 oleh sepasang suami istri, Amjad Atallah dan Zainab Salbi, seorang warga Irak Amerika yang selamat dari perang Iran/Irak. Mereka termotivasi untuk bertindak setelah mengetahui penderitaan perempuan di *camp* pemerkosaan selama Perang Yugoslavia dan lambatnya tanggapan masyarakat internasional (WOAM, 2018)

Kantor pusat WFWI berada di Washington, DC, dan terdapat kantor eksekutif/penggalangan dana di London, Inggris, dan Hamburg, Jerman. WFWI menyediakan sumber daya ini melalui program bertahap sepanjang tahun yang dimulai dengan bantuan keuangan langsung dan dukungan emosional. Mereka juga belajar tentang hak hukum mereka, menerima pelatihan keterampilan hidup seperti kesadaran kesehatan, berhitung, penganggaran dan tabungan, pengambilan keputusan dan negosiasi, partisipasi masyarakat, belajar keterampilan bisnis dan kejuruan, dan mendapatkan akses ke aktivitas yang menghasilkan pendapatan di mana mereka dapat menerapkan keterampilan tersebut dan mulai bergerak menuju stabilitas ekonomi. Seiring dengan membantu lebih dari 478.000 wanita dalam 20 tahun terakhir untuk membangun kembali kehidupan mereka sendiri dan keluarga serta komunitas mereka setelah perang. WFWI menggunakan suaranya untuk menarik perhatian global terhadap peran unik yang dimainkan wanita dalam memajukan perdamaian di seluruh masyarakat. WFWI melakukan kegiatan di

negara-negara seperti Afghanistan, Bosnia, Herzegovina, Republik Demokratik Kongo, Irak, Kosovo, Nigeria, Rwanda, dan Sudan Selatan (WFWI, 2023a).

Diskriminasi dan kemiskinan perempuan sangat tinggi di Afghanistan. Perempuan Afghanistan sering menjadi korban kekerasan dan mengalami diskriminasi dalam hal akses ke kesehatan, pendidikan, dan hak politik lainnya. (Nurfahirah et al., 2022). Dengan adanya fenomena tersebut menimbulkan banyak kontroversi terutama mengenai hak asasi terhadap perempuan. Bagaimana hak asasi mereka direnggut yang bahkan bisa dikatakan sebagai ancaman keamanan terhadap negara Afghanistan sendiri. Karena yang terjadi adalah tidak adanya keamanan manusia. Keamanan manusia diatur di sekitar konsep kehidupan dan martabat manusia. Tetapi keamanan negara pun menyangkut kehidupan manusia, mereka mengutamakan negara atau masyarakat sebagai alat untuk melindungi kehidupan dan martabat manusia. Perang saudara di Afghanistan merupakan salah satu faktor yang menyebabkan ancaman keamanan. Perang saudara tersebut terjadi pada tahun 1989 dan tidak terlepas dari masalah hak asasi manusia (HAM), yang memperkuat argumen bahwa HAM dapat menjadi ancaman terhadap keamanan negara. (Burns H. Weston, 1984).

Diskriminasi terhadap perempuan di Afghanistan dimulai ketika Taliban berkuasa pada tahun 1996. Taliban didirikan oleh kelompok pejuang gerilya Islam yang didominasi oleh suku Pashtun tradisional yang menentang tradisi Barat pada tahun 1990-an. Ketidaksetaraan gender dimulai saat Taliban memerintah. Di Afghanistan, banyak kebebasan perempuan yang dibatasi. Ini termasuk dilarang bersekolah, bekerja, berpolitik, dan bahkan keluar dari rumah tanpa pendamping

laki-laki. Selain itu, hukum Afghanistan mewajibkan perempuan memakai burqa, atau pakaian yang menutupi seluruh tubuh mereka (Nurfahirah et al., 2022).

Sebelum Taliban datang ke Afghanistan, perempuan di Afghanistan di era partai komunis dan pemerintahan kerajaan memiliki kebebasan karena mereka ingin adanya perubahan ke arah yang lebih modern. Perempuan diperbolehkan bersekolah bahkan dibukanya rumah sakit khusus perempuan. Dan perempuan saat itu tidak diwajibkan menggunakan cadar. Tetapi pemimpin Afghanistan pada masa itu memaksakan perubahan yang sangat cepat yang berkaitan dengan status perempuan ke arah yang lebih modern. Banyak orang di pedesaan Afghanistan merasa bahwa reformasi itu terlalu barat bagi masyarakat mereka dan perubahan yang dipaksakan itu bertentangan dengan orang-orang di pedesaan. Terutama laki-laki Afghanistan melihat perubahan ini menentang otoritas keluarga dan suku mereka. Akhirnya terjadilah masa konflik antara elit modernisasi dan suku tradisional. Para pemimpin suku tradisional menguasai wilayah elit modernisasi dan melakukan persatuan antar suku dan menguasai sebagian besar negara dalam menolak upaya modernisasi (Ibid, 2022).

Setelah menggulingkan pemimpin elit modernisasi, terjadilah perang saudara di antara mereka untuk menjadi pemimpin selanjutnya yang membuat keamanan mereka sangat minim. Yang akhirnya membuat Afghanistan di invasi oleh Uni Soviet walaupun Uni Soviet membantu memulai perjalanan ke arah modernisasi. Perempuan di Afghanistan pun diizinkan untuk berpolitik dan memberi mereka hak untuk memilih dan diperbolehkan bekerja bahkan menteri departemen kesehatan adalah wanita. Tetapi lagi-lagi perubahan tersebut menimbulkan kekhawatiran bagi pemimpin suku dan laki-laki Afghanistan. Seperti yang dilaporkan Moghadam

(1997), insiden penembakan wanita berpakaian barat, pembunuhan orang-orang PDPA (Partai Komunis Rakyat Afghanistan) di daerah pedesaan dan pelecehan umum terhadap pekerja sosial wanita meningkat. Dan akhirnya Afghanistan dimasuki oleh kaum Mujahidin. Afghanistan menyaksikan perang kaum Mujahidin dan Uni Soviet dan dipicu oleh kekuatan eksternal, pendanaan bahkan kepentingan politik oleh Amerika Serikat (AS), Iran, Arab Saudi, Pakistan, dan China. Mujahidin curiga dengan Uni Soviet untuk memusnahkan budaya dan agama tradisional Afghanistan (Ibid, 2022).

Pada tahun 1979, Uni Soviet meninggalkan Afghanistan, negara itu berantakan dan menjadi perang antar saudara dengan transfer kekuasaan pemerintah pada tahun 1992. Tahun itu Mujahidin mengambil alih Kabul dan menyatakan Afghanistan sebagai negara Islam. Wanita semakin dilarang dari pelayanan publik. Bahkan mujahidin membakar universitas, perpustakaan, dan sekolah. Wanita dipaksa mengenakan burqa. Dan setiap hari selalu terjadi pembunuhan, pemerkosaan, amputasi, pernikahan paksa dan bentuk kekerasan lainnya bahkan untuk menghindari hal tersebut, para wanita muda melakukan bunuh diri (Messwati Dyah, 2019).

Kemudian pada tahun 1996, konsorsium yang sama (AS, Pakistan, Iran, dan Arab Saudi) mendukung Taliban untuk melawan politik dan kebrutalan Mujahidin yang tak terduga. Awalnya lega tetapi hanya sebentar saat Taliban mendirikan Amar Bil Maroof Wa Nahi An al-Munkar (Departemen Promosi Kebijakan dan Pencegahan Kejahatan) untuk memantau dan mengendalikan perempuan. Taliban mengingatkan warga akan kewajiban mereka terhadap negara dan Islam. Dengan mengesahkan aturan-aturan perubahan yang perlu dilakukan kaum pria dan wanita

untuk mengubah perilaku mereka agar sejalan dengan rezim fundamentalis yang baru. Bagi perempuan berarti tidak bisa lagi keluar rumah kecuali untuk membeli makanan. Jika perempuan memang meninggalkan rumah, mereka harus didampingi mahram (kerabat laki-laki). Wanita juga harus memakai burqa, tidak ada make up atau sepatu mewah (Ibid, 2019).

Meskipun Taliban belum diusir sepenuhnya dari Afghanistan pada tahun 2001, AS menggulingkan pemerintahan Taliban. Karena budaya yang kuat yang ditanamkan oleh pemerintahan sebelumnya dan Taliban, perempuan masih menghadapi diskriminasi terhadap hak-hak mereka. Budaya ini telah menjadi standar dalam masyarakat Afghanistan, terutama di kalangan laki-laki yang memandang perempuan hanya sebagai ibu rumah tangga. Selain itu, Afghanistan menganut hukum Islam, tetapi sering kali melenceng dari prinsip-prinsip hukum Islam tersebut. Jika perempuan melakukan kesalahan, mereka akan dikenai sanksi sesuai dengan hukum Islam, api sanksi tersebut sering kali berupa kekerasan (Messwati Dyah, 2019).

Hingga saat ini, perempuan di Afghanistan masih mengalami diskriminasi dan terus berjuang untuk memperoleh hak-hak publik mereka. Meskipun terjadi kekerasan di negara tersebut, banyak perempuan Afghanistan yang menjadi korban tewas akibat pertempuran atau ledakan bom. Pada tahun 2019, misalnya, 15 warga sipil, termasuk 6 perempuan, 1 laki-laki, dan 8 anak-anak, tewas ketika kendaraan mereka menabrak ranjau darat yang ditanam oleh Taliban. (Ibid, 2019).

Taliban berusaha menunjukkan bahwa ideologi mereka, serta norma-norma mereka tentang gender dan seksualitas, adalah yang paling benar. Juru bicara Taliban, Zabihullah Mujahid, menyatakan bahwa hak yang sama berlaku untuk

laki-laki dan perempuan, setelah merebut kembali Kabul. Selain itu, ia menyatakan bahwa Taliban berusaha untuk membangun masa depan Afghanistan (Ni'ami Fatih, 2022) dan melupakan masa lalu negara tersebut. Selain itu, mereka meyakinkan perempuan bahwa mereka dapat bekerja dan berpartisipasi dalam pemerintahan sambil tetap mengikuti syariat Islam. Akan tetapi, beberapa minggu kemudian, situasi berubah. Perguruan tinggi negeri ditutup, dan perempuan Afghanistan diperintahkan untuk tetap di rumah demi keamanan mereka. Meskipun rezim Taliban mengklaim bertindak untuk kepentingan perempuan, perempuan dan anak-anak Afghanistan miskin, kesehatan mereka buruk, dan tidak terdidik. Bagi Taliban, ideologi lebih penting daripada kesejahteraan rakyat, dan mereka tidak peduli akan pengakuan dari dunia internasional. Taliban sengaja menghapus hak-hak dasar, seperti hak bersekolah bagi anak perempuan, sebagai alat tawar politik untuk memperkuat posisi mereka dalam negosiasi (Ibid, 2022).

Setelah Taliban kembali berkuasa, perempuan Afghanistan mengalami berbagai kesulitan, seperti diwajibkannya mengenakan burqa, dilarang berseah dan bekerja, serta terjadi pernikahan paksa di beberapa wilayah yang dikuasai oleh Taliban. Sebagai akibatnya, banyak perempuan yang kembali mengenakan cadar dan berusaha menyembunyikan bahwa mereka pernah mendapatkan pendidikan sebelum Taliban berkuasa. Hal ini merupakan situasi yang sangat sulit bagi perempuan Afghanistan saat ini. Demikian laporan yang diberitakan oleh The Wall Street Journal (Ibid, 2022).

Dalam hal kesehatan, perempuan hamil di Afghanistan mengalami kesulitan dalam mengakses fasilitas persalinan yang memadai. Karena kurangnya tenaga medis perempuan dan larangan untuk berinteraksi dengan laki-laki, banyak

perempuan harus melahirkan di rumah dengan fasilitas yang minim. Menurut survei yang dilakukan oleh WHO di empat provinsi, diperkirakan terdapat 638 kematian ibu hamil per 10.000 kelahiran. Bahkan, banyak rumah sakit di Afghanistan yang tidak menyediakan layanan dasar untuk ibu hamil dan bayi, serta tidak memiliki peralatan yang memadai untuk melakukan operasi caesar. Hal ini merupakan tantangan besar bagi kesehatan perempuan hamil di Afghanistan (Klau Serlince, 2021).

Perempuan di Afghanistan mengalami kesulitan dalam mengakses pendidikan karena beberapa faktor, seperti kurangnya pengajar perempuan dan larangan bersekolah oleh Taliban. Mereka hanya diizinkan untuk mempelajari Al-Quran. Karena sebagian besar tenaga pengajar di Afghanistan adalah laki-laki, sistem kebudayaan yang melarang perempuan untuk berhubungan dengan laki-laki menyebabkan perempuan kesulitan mendapatkan pendidikan yang layak. UNESCO melaporkan bahwa hanya 17% perempuan Afghanistan yang melek huruf. Terdapat dua faktor yang membatasi perempuan Afghanistan dalam mendapatkan pendidikan yang layak, yaitu faktor politik dan sosiokultural yang berdampak negatif pada pendidikan perempuan. Kelompok Taliban, misalnya, beranggapan bahwa perempuan tidak perlu mendapatkan pendidikan dan bahkan dapat membahayakan mereka. Anggapan ini telah menjadi budaya turun-temurun di masyarakat Afghanistan. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan Afghanistan mengalami kesulitan dalam mengakses pendidikan yang layak karena berbagai faktor yang mempengaruhi sistem pendidikan di negara tersebut (Ibid, 2021).

Dalam hal pekerjaan, perempuan di Afghanistan mengalami kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan dan dilarang bekerja di luar rumah oleh kelompok Taliban.

Contohnya adalah Habiba Sarabi, yang dilarang bekerja saat Taliban berkuasa sehingga ia harus melarikan diri ke Pakistan untuk kembali mengajar di sana. Dalam hal politik, perempuan di Afghanistan tidak memiliki hak untuk memilih dan dilarang terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Diskriminasi yang dialami oleh perempuan Afghanistan menunjukkan bahwa mereka kurang dihargai dan masih dianggap lebih rendah daripada laki-laki. Selain itu, perempuan di Afghanistan menghadapi banyak pembatasan dalam mengakses sistem peradilan di negaranya. Aturan yang mengharuskan perempuan ditemani oleh pria ketika keluar rumah menyebabkan mereka kesulitan untuk datang ke pengadilan secara mandiri. Selain itu, kesaksian perempuan di pengadilan hanya dianggap setengah dari kesaksian pria. Oleh karena itu, banyak perempuan yang menjadi terdakwa dalam suatu kasus hukum mengalami kesulitan untuk membuktikan bahwa mereka tidak bersalah. Semua hal ini menunjukkan bahwa perempuan di Afghanistan mengalami banyak kendala dalam hal pekerjaan, politik, dan sistem peradilan (Ibid, 2021, p. 2).

Jika perempuan tidak mematuhi aturan, mereka akan dipukuli, dicambuk, atau dirajam sampai mati. PBB melaporkan bahwa, meskipun Afghanistan memiliki angka kematian perempuan tertinggi di dunia, jumlah perempuan dan anak perempuan yang terbunuh dan terluka dalam setengah tahun mencapai dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. (Ni'ami Fatih, 2022).

Data yang disajikan menunjukkan bahwa banyak hak perempuan dilanggar. Setiap manusia memiliki hak asasi manusia, yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh pemerintah. Hak-hak ini termasuk hak untuk hidup dan hak keadilan. Namun, perempuan Afghanistan kehilangan hak-hak yang seharusnya

mereka miliki sejak konflik berlanjut. Pada dasarnya, hak asasi manusia dapat mencakup berbagai bidang, seperti hukum, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, tanpa membedakan ras, agama, ras, atau gender. Deklarasi Hak Asasi Manusia Universal (UDHR), yang diakui oleh negara-negara lain di seluruh dunia, menunjukkan kesadaran masyarakat internasional akan pentingnya perlindungan HAM dan perempuan di seluruh dunia. Meskipun pada dasarnya setiap deklarasi yang berkaitan dengan HAM menyatakan bahwa diskriminasi antara perempuan dan laki-laki tidak benar, masyarakat dunia internasional masih sering membahas masalah ini (B Wiranata & Muladi, 2005).

Jika seseorang ingin dunia berdamai, hak asasi manusia adalah dasar yang harus dimiliki oleh semua orang. Menurut HAM, setiap orang berhak atas kesetaraan sosial, sosial, budaya, dan ekonomi. Karena pengabaian dan pengabaian hak asasi manusia, perbuatan keji yang menimbulkan kemarahan sesama manusia muncul. Karena perspektif gender dan anti diskriminasi, perempuan memiliki hak yang sama dalam berbagai bidang. (Ibid, 2005).

Kasus perampasan hak-hak perempuan di Afghanistan menarik perhatian dunia, termasuk organisasi non-pemerintah internasional yang berfokus pada penanganan hak asasi perempuan dan kesetaraan gender. Salah satunya adalah *Women For Women International (WFWI)*. Pemerintah Afghanistan bekerja sama dengan WFWI untuk meningkatkan status perempuan dan mewujudkan kesetaraan gender (Ibid, 2005).

Organisasi WFWI bekerja sama dengan pemerintah Afghanistan untuk membantu mengatasi diskriminasi gender dengan memberdayakan perempuan agar memiliki hak yang sama untuk hidup layak. Kerja sama ini dilakukan tingkat

nasional dengan pemerintah Afghanistan. WFWI memberikan pendidikan dan pelatihan kepada perempuan serta mendorong partisipasi mereka dalam berbagai kegiatan. Keterlibatan WFWI di Afghanistan menjadi sarana bagi perempuan untuk memperbaiki kehidupan mereka dan membebaskan diri dari kekerasan dan diskriminasi. WFWI mulai melaksanakan program pemberdayaan perempuan di Afghanistan sejak tahun 2002 hingga sekarang. WFWI telah memberdayakan lebih dari 347.682 perempuan dengan bekerja sama dengan organisasi non-pemerintah lokal di Afghanistan. Program-program yang ditawarkan WFWI meliputi peningkatan penghasilan dan tabungan, kesehatan dan kesejahteraan, pengaruh dan pengambilan keputusan, jaringan sosial, dan melibatkan pria. (Lestari, 2022).

Organisasi *Women for Women International* (WFWI) yang beroperasi di Afghanistan memberikan kontribusi penting dalam memberdayakan perempuan di negara itu. Kementerian Keadilan pemerintah Afghanistan menyatakan bahwa negara Afghanistan menghadapi berbagai tantangan besar. Pernyataan ini menyiratkan bahwa dari berbagai masalah yang dihadapi Afghanistan, mereka membutuhkan bantuan organisasi internasional seperti WFWI untuk membantu mengatasi kelemahan pemerintah Afghanistan salah satunya dalam melindungi hak-hak perempuan. (Septiadi Agung, 2019). Namun kenyataannya, setelah ditelaah lebih jauh diskriminasi perempuan di Afghanistan masih terjadi meskipun sudah mendapatkan bantuan dari WFWI. tetapi WFWI tidak pantang menyerah untuk terus membantu perempuan Afghanistan mendapatkan hak-hak mereka (Messwati Dyah, 2019).

Maka dari itu, WFWI membangun visi misi yang tujuan utamanya adalah membangun kesetaraan gender, terutama untuk hak-hak perempuan yang masih

ditemukan banyak ketidakadilan dan mengembalikan hak-hak mereka. Sebagai organisasi internasional non pemerintah, WFWI yang bergerak khusus di bidang pemberdayaan wanita. Organisasi ini sangat berperan untuk membantu dan meringankan penderitaan bagi para wanita yang mendapatkan diskriminasi di sekitarnya.

Maka berdasarkan latar belakang serta permasalahan yang telah dipaparkan, penulis mengangkat fenomena ini menjadi sebuah penelitian yang berjudul **Upaya Women For Women International (WFWI) melalui Program Stronger Women Stronger Nations (SWSN) dalam Pemberdayaan Perempuan di Afghanistan.**

## **1.2. Perumusan Masalah**

Mengacu pada latar belakang dan identifikasi masalah yang sudah dipaparkan sebelumnya, maka peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut **“Bagaimana Upaya Women for Women International (WFWI) melalui Program Stronger Women Stronger Nations (SWSN) dalam Pemberdayaan Perempuan di Afghanistan?”**

## **1.3. Pembatasan Masalah**

Untuk memudahkan dalam menganalisa permasalahan di atas, penulis memberi pembatasan masalah agar pembahasan tidak keluar dari inti pembahasan dan memfokuskan permasalahan pada upaya WFWI dalam pemberdayaan perempuan di Afghanistan. Penulis membatasi periode yaitu pada kurun waktu tahun 2020-2022. Pembatasan masalah pada tahun 2020-2022 sangat penting karena terjadi diskriminasi yang intens terhadap

perempuan, seperti yang dilaporkan oleh OHCHR pada tahun 2023. Selain itu, aktivitas Taliban dan kelompok teroris lainnya juga meningkat, yang mengakibatkan kematian warga sipil. Tidak hanya itu, perpindahan kekuasaan dari Pemerintah Republik Afghanistan ke Taliban pada tahun 2021 juga memperburuk situasi, terutama bagi perempuan. Menurut laporan Amnesty International, diskriminasi terhadap perempuan meningkat secara drastis semenjak Taliban berkuasa. Oleh karena itu, *Women for Women International* (WFWI) terlibat untuk membantu mengatasi isu diskriminasi perempuan di Afghanistan. Selain itu, kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah Taliban juga sangat diskriminatif terhadap perempuan, seperti larangan bersekolah, bekerja, dan masuk ke tempat-tempat umum seperti taman hiburan, pemandian umum, pusat kebugaran, dan klub olahraga. Perempuan juga diwajibkan untuk menggunakan burqa dan tidak diizinkan bepergian lebih dari 75 km tanpa mahram.

#### **1.4. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

##### **1.4.1. Tujuan Penelitian**

Terkait dengan masalah yang akan dibahas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui peran *Women for Women International* di Afghanistan
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya *Women for Women International* dalam pemberdayaan perempuan di Afghanistan
3. Untuk mengetahui hasil dari penerapan *Women for Women International* di Afghanistan

#### **1.4.2. Kegunaan Penelitian**

1. Penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan dan menambah wawasan kajian Hubungan Internasional yaitu WFWI dalam pemberdayaan perempuan di Afghanistan.
2. Sebagai prasyarat kelulusan mata kuliah skripsi dalam program studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Pasundan.